

Manuskripita

Journal of Nusantara Manuscript Studies

Volume 16 No. 1, 2026



Manuskripta

PIMPINAN REDAKSI
Oman Fathurahman

DEWAN PENYUNTING INTERNASIONAL
*Achadiati Ikram, Annabel Teh Gallop, Dick van der Meij, Ding Choo Ming,
Edwin Wieringa, Henri Chambert-Loir, Jan van der Putten, Mujizah,
Nabilah Lubis, Roger Tol, Siti Chamamah Soeratno, Sudibyo,
Titik Pudjiastuti, Yumi Sugahara, Willem van der Molen*

PENYUNTING
*Aditia Gunawan, Ali Akbar, Asep Saefullah, Agus Iswanto,
M. Adib Misbachul Islam, Muhammad Nida' Fadlan,
Munawar Holil, Priscila Fitriasih Limbong, Yulianetta,*

REDAKTUR PELAKSANA
Abdullah Maulani

ASISTEN PENYUNTING
*Rahmatia Ayu Widyaningrum
Muhammad Heno Wijayanto*

DESAIN SAMPUL
Agung Zaenal Muttakin Raden

ALAMAT REDAKSI
*Sekretariat Masyarakat Pernaskahan Nusantara (MANASSA)
Gedung VIII, Lantai 1, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya,
Universitas Indonesia, Kampus UI Depok, 16424
Website. <http://journal.perpusnas.go.id/index.php/manuskripta>
Email. jmanuskripta@gmail.com*

MANUSKRIPTA (P-ISSN: 2252-5343; E-ISSN: 2355-7605) adalah jurnal ilmiah yang dikelola oleh Masyarakat Pernaskahan Nusantara (Manassa), asosiasi profesi pertama dan satu-satunya di Indonesia yang memperhatikan pengkajian dan pelestarian naskah Nusantara. Jurnal ini dimaksudkan sebagai media pembahasan ilmiah dan penyebaran hasil penelitian di bidang kajian naskah Nusantara. Terbit dua kali dalam setahun.

Daftar Isi

Artikel



- 1 *R. Bima Slamet Raharja*
Teks-teks Lakon Wayang
Karya Ki Widiprayitna Eks-Koleksi
J. L. Moens: Jembatan Masa Lalu terhadap Kajian
Filologi Pertunjukan
- 31 *Pande Putu Abdi Jaya Prawira*
Sarining Pamutus: Mantra Ruwat Jawa Kuno
dalam Catatan Lontar Bali
- 61 *Joko Daryanto, Bambang Sunarto, Bimo Kuncoro*
Ladrang Sri Katon Laras Pelog Pathet Barang:
Artikulasi Politik Masa Pemerintahan
Paku Buwana X
- 83 *Indra Sopian, Muhammad Sigit Pramudya,*
Asep Achmad Hidayat, Dedi Supriadi, Zulmi Ramdani
Formulasi Fitur Visual
Manuskrip Arab Pegon Sunda
untuk Pengembangan Sistem
Handwritten Text Recognition (HTR)
Berbasis Artificial Intelligence (AI)
- 113 *Hady Prasetya*
Bahasa Orang-Orang Mandala:
Relasi Bahasa antara Lontar Sunda
dengan Bahasa Orang Baduy



Joko Daryanto, Bambang Sunarto, Bimo Kuncoro

.....

Ladrang Sri Katon Laras Pelog Pathet Barang: Artikulasi Politik Masa Pemerintahan Paku Buwana X

Abstract: Paku Buwana X, who ruled Surakarta Hadiningrat from 1893 to 1939, placed *Ladrang Sri Katon Laras Pelog Pathet Barang* as the Gendhing Pakurmatan Miyos Dalem, a piece of music played to honor the king's arrival at special events within the palace grounds. During Paku Buwana X's reign, *Ladrang Sri Katon Laras Pelog Pathet Barang* was performed alongside the Dutch national anthem, Wilhelmus. The *Serat Sri Karongron* by Raden Ngabehi Purbadipura describes the simultaneous presentation of two musical works, each with its own musical basis. The presentation of *Ladrang Sri Katon Laras Pelog Pathet Barang* alongside the Dutch national anthem served as Paku Buwana X's political articulation, affirming that the Surakarta king still possessed legitimate power. The presentation of two musical works with different musical bases is part of Paku Buwana X's effort to demonstrate his power. This paper uses a hermeneutic approach to interpret the texts in *Serat Sri Karongron* by Raden Ngabehi Purbadipura.

Keywords: *Serat Sri Karongron*, Paku Buwana X, Political Articulation, Surakarta, Hermeneutics.

Abstrak: Paku Buwana X yang memerintah Negari Surakarta Hadiningrat pada 1893 – 1939 menempatkan *Ladrang Sri Katon Laras Pelog Pathet Barang* sebagai *Géndhing Pakurmatan Miyos Dalêm* yaitu gending yang dibunyikan untuk menghormati kedatangan raja pada acara-acara tertentu di lingkungan istana. Sajian *Ladrang Sri Katon Laras Pelog Pathet Barang* pada masa pemerintahan Paku Buwana X disajikan bersamaan dengan lagu kebangsaan Belanda Wilhelmus. *Serat Sri Karongron* karya Raden Ngabehi Purbadipura mendeskripsikan peristiwa penyajian dua karya musikal dengan basis musikal yang berbeda secara bersamaan. Penyajian *Ladrang Sri Katon Laras Pelog Pathet Barang* bersamaan dengan lagu kebangsaan Belanda merupakan artikulasi politik Paku Buwana X bahwa raja Surakarta masih memiliki legitimasi kekuasaan. Penyajian dua karya musik dengan basis musikal yang berbeda merupakan bagian dari upaya Paku Buwana X menunjukkan kekuasaannya. Tulisan ini menggunakan pendekatan hermeneutik untuk menginterpretasi teks-teks dalam *Serat Sri Karongron* karya Raden Ngabehi Purbadipura.

Kata Kunci: *Serat Sri Karongron*, Paku Buwana X, Artikulasi Politik, Surakarta, Hermeneutika.

Kraton Surakarta adalah salah satu penerus Kerajaan Mataram yang pecah akibat perjanjian Giyanti (1755). Perjanjian Giyanti bermuara pada pembagian Mataram menjadi dua yaitu Surakarta dan Yogyakarta. Kraton Surakarta sebagai penerus Dinasti Mataram keberadaannya masih cukup kuat. Bangunan fisik yang cukup megah, ditunjang dengan adat-istiadat, upacara dan tata cara pergaulan sehari-hari yang masih berlaku merupakan penanda kehidupan Kraton Surakarta beserta budaya tradisinya. Mayoritas upacara tradisi Kraton Surakarta yang dilaksanakan pada hari-hari tertentu selalu melibatkan karawitan di dalamnya. Dengan kata lain karawitan menjadi bagian yang tidak terpisahkan atau menjadi bagian penting pada upacara tradisi Kraton Surakarta.

Peran karawitan dalam kehidupan tradisi Kraton Surakarta telah berlangsung sejak Kraton Surakarta berdiri, bahkan sejak Mataram belum pecah menjadi Surakarta dan Yogyakarta. Sejarah mencatat meskipun berbagai persoalan serius menimpa Mataram termasuk peristiwa *palihan nagari*¹ yang mengakibatkan Mataram pecah menjadi dua bagian Surakarta dan Yogyakarta, tradisi seni tetap menjadi bagian dari aktivitas kerajaan (Fananie 1994, bk. 220). Dapat dikatakan bahwa karawitan secara kontinyu menjadi penopang kehidupan tradisi Kraton Surakarta sejak Mataram belum terpecah menjadi dua bagian, *palihan nagari*, hingga saat ini.

Karawitan Kraton Surakarta secara kontinyu masih terlihat aktivitasnya meski beragam peristiwa menerpa dan raja yang silih berganti. Saat Paku Buwana X memerintah Kraton Surakarta pada kurun waktu tahun 1893 hingga tahun 1939, kehidupan karawitan Kraton Surakarta mencapai masa keemasan. Pradjapangrawit menggambarkan masa keemasan karawitan Kraton Surakarta dengan kalimat:

*Têtabuhan gangsa alus, thuthukanipun nêngsêmakên,
gêndhingipun kathah warni-warni; gêndhing kina, gêndhing baku*

1 Istilah lain untuk menyebut pecahnya Mataram menjadi dua yaitu Surakarta dan Yogyakarta

kraton, gèndhing prènès, gèndhing gècul, utawi gèculan dalah gèndhing manca utawi pasisir inggih kacakup (Pradjapangrawit 1990a)

(Gamelan ditabuh dengan halus, suara yang dihasilkan menghanyutkan, banyak gending yang dikuasai, baik gending kuno, gending tradisi kraton, *gèndhing prènès, gèndhing gècul* maupun gending dari daerah pesisir.)

Petikan catatan Pradjapangrawit di atas mendeskripsikan ragam gending yang disajikan dan kualitas *tabuhan abdi dalêm niyaga*² Kraton Surakarta pada masa pemerintahan Paku Buwana X. Beragam jenis gending dan kualitas tabuhan yang mumpuni serta virtuositas paripurna dimiliki oleh *abdi dalêm niyaga* Kraton Surakarta pada masa tersebut. Tulisan Pradjapangrawit pada Serat Wedhapradangga dapat dijadikan sebagai salah satu petunjuk kemajuan kehidupan karawitan pada masa pemerintahan Paku Buwana X.

Petunjuk kejayaan dan pentingnya peran karawitan Kraton Surakarta pada masa pemerintahan Paku Buwana X juga ditulis oleh R. Ng. Purbadipura dalam Serat Sri Karongron. Purbadipura secara rinci menuliskan beragam *tatacara*³ beserta aktivitas karawitan sebagai bagian penting dari *tatacara* Kraton Surakarta. Deskripsi Purbadipura dalam Serat Sri Karongron menyebutkan setiap *tatacara* yang dihadiri oleh Residen atau perwakilan pemerintah Hindia Belanda selalu dibunyikan lagu kebangsaan Belanda yaitu *Wilhelmus*. Di sisi lain, ketika Paku Buwana X *miyos*⁴ menyambut kedatangan Residen selalu disajikan *Ladrang Sri Katon laras pélog pathêt barang*. Dua kultur musik yang berbeda disajikan secara bersamaan namun keduanya bermakna sama yaitu artikulasi politik sebagai peneguhan kekuasaan secara politik.

Ladrang Sri Katon laras pélog pathêt barang merupakan

- 2 Pegawai Kraton Surakarta yang bertugas di divisi seni karawitan
- 3 Ritus yang berlangsung di Kraton Surakarta
- 4 Keluar dari Prabasuyasa menuju tempat berlangsungnya upacara

Gêndhing Pakurmatan Miyos Dalêm. Sêrat Sri Karongron tulisan Purbadipura selalu menyebut *Ladrang Sri Katon laras pélog pathêt barang* ketika Paku Buwana X hadir pada acara tertentu. Realitas ini menunjukkan bahwa Paku Buwana X sebagai raja *Nêgari Surakarta Hadiningrat*⁵ berupaya menunjukkan legitimasi kekuasaannya melalui sajian gending. Bagaimana *Ladrang Sri Katon laras pélog pathêt barang* menjadi bagian dari artikulasi politik Paku Buwana X merupakan pokok permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut dalam tulisan ini.

Sumber utama tulisan ini adalah *Serat Sri Karongron* tulisan R. Ng. Purbadipura *abdi dalêm kaliwon* di Kraton Surakarta. Purbadipura secara rinci mendeskripsikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di Kraton Surakarta. *Sêrat Sri Karongron* karya Purbadipura mendeskripsikan *tatacara* beserta gamelan yang ditabuh dan gending yang disajikan. Berdasarkan tulisan Purbadipura ditemukan gending yang digunakan untuk menghormati kedatangan raja Surakarta yaitu *Ladrang Sri Katon laras pélog pathêt barang*, masyarakat Kraton Surakarta lazim menyebut dengan *Gêndhing Pakurmatan Miyos Dalêm*.

Kehidupan Dunia Kraton Surakarta 1893-1939 tulisan Darsiti Soeratman merupakan rujukan untuk mengetahui aktivitas dan adat istiadat yang hidup di Kraton Surakarta pada masa pemerintahan Paku Buwana X. *Serat Sujarah Utawi Riwayating Gamelan (Wedhapradangga)* tulisan R. Ng. Pradjapangrawit mendeskripsikan aktivitas karawitan Kraton Surakarta. Buku ini ditulis berdasarkan sumber lisan, namun demikian tulisan Pradjapangrawit ini dapat digunakan sebagai petunjuk bahwa karawitan pada masa pemerintahan Paku Buwana X mencapai tataran keemasan.

Karawitan Jawa Masa Pemerintahan Paku Buwana X: Perspektif Historis dan Teoretis tulisan Waridi. Buku ini secara spesifik berkisah tentang kehidupan karawitan Kraton

Sebutan lain untuk Kraton Surakarta sebelum bergabung ke NKRI 1

o

September 1945

Surakarta masa pemerintahan Paku Buwana X. Raja Priyayi dan Kawula: Surakarta 1900–1915 (Kuntowijoyo 2004) berkisah tentang pribadi Paku Buwana X. Analisis Kuntowijoyo sampai pada kesimpulan bahwa salah satu faktor pendukung kejayaan Kraton Surakarta masa pemerintahan Paku Buwana X adalah kecerdasan emosi Paku Buwana X. Masa Menjelang Revolusi (Larson 1990) berkisah tentang situasi sosial politik Kraton Surakarta pada akhir masa pemerintahan Paku Buwana X. Informasi dalam buku ini sangat berguna sebagai rujukan untuk mengetahui dinamika sosial politik Kraton Surakarta pada masa tersebut.

Bagi masyarakat Kraton Surakarta, gamelan ditempatkan sebagai salah satu benda pusaka yang dapat digunakan sebagai salah satu alat pendukung kekuasaan raja. Hal inilah yang menyebabkan setiap upacara kenegaraan di Kraton Surakarta harus disertai dengan membunyikan gamelan-gamelan tertentu. Tulisan Judith Becker menyatakan bahwa peristiwa pembunyian gamelan pada saat upacara tertentu di Kraton Surakarta dapat dijadikan sebagai salah satu penanda kebesaran kekuasaan raja, dengan kata lain gamelan berfungsi sebagai legitimasi raja Karaton Surakarta (Becker 1980). Pernyataan Judith Becker dapat dijadikan sebagai rujukan bahwa kedaulatan raja terlihat pada saat gamelan dibunyikan, dengan kata lain bunyi gamelan adalah pernyataan kedaulatan raja atau *sonic sovereignty*.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan sejarah. Pendekatan sejarah digunakan karena pendekatan ini bermuara pada upaya mendeskripsikan, menjelaskan, menggali informasi yang mendalam, serta mengeksplorasi dan menginterpretasi terhadap peristiwa yang telah lampau. Interpretasi terhadap peristiwa masa lampau dan didokumentasikan dalam bentuk teks dilakukan dengan menggunakan pendekatan hermeneutik. Wilhelm Dilthey menyatakan bahwa proses hermeneutika adalah sesuatu yang 'menyejarah' (Mulyono 2012). Dalam konteks ini hermeneutika

digunakan untuk menginterpretasi teks sejarah utamanya sejarah seni pertunjukan.

Sêrat Sri Karongron yang ditulis oleh R. Ng. Purbadipura merupakan deskripsi peristiwa yang terjadi di lingkungan masyarakat Kraton Surakarta. Pemaknaan teks *Sri Karongron* tentu saja harus disertai dengan pemaknaan konteks di mana peristiwa pertunjukan berlangsung. Dapat dikatakan tulisan ini tidak hanya menginterpretasi teks saja melainkan dikorelasikan dengan konteks kebudayaan Kraton Surakarta. Pendekatan teks dan konteks digunakan untuk memaknai peristiwa yang tertulis di *Sêrat Sri Karongron*. Teks yang tertulis di *Sêrat Sri Karongron* utamanya deskripsi peristiwa kesenian di Kraton Surakarta adalah teks yang dibaca dan ditafsirkan. Konsekuensi dari menempatkan sebuah peristiwa kesenian sebagai teks adalah, teks tersebut harus dibaca dan ditafsirkan (Ahimsa 2000). Peristiwa penyajian gending di Kraton Surakarta dipahami sebagai fenomena sosial budaya dan dapat ditempatkan sebagai kalimat atau teks yang bisa dibaca. Pada bagian lain, sebuah teks atau kalimat sebagai fenomena sosial budaya harus memiliki gejala dengan makna tertentu sebagai petunjuk adanya pemikiran-pemikiran tertentu yang menghasilkan makna.

Situasi Sosial Politik Masa Paku Buwana X

Tanggal 30 Maret 1893 Bandara Raden Mas Gusti (BRMG) Sayidin Malikul Kusna naik tahta menjadi penerus Paku Buwana IX. Penetapan BRMG. Malikul Kusna telah dipersiapkan sebagai penerus ayahnya yaitu Paku Buwana IX sejak usia tiga tahun. Dengan kata lain, status putra mahkota dengan gelar *Kanjêng Gusti Pangéran Adipati Anom Hamangkunagara Sudibya Raja Putra ing Mataram* atau *Pangéran Adipati Anom VI* telah disematkan kepada BRMG. Sayidin Malikul Kusna saat berusia tiga tahun. Lima hari sebelum naik tahta, putra mahkota harus menandatangani sebuah *Verklaring*. Penandatanganan *Verklaring* merupakan upaya pemerintah Hindia Belanda agar

raja baru tunduk pada kemauan pemerintah Hindia Belanda termasuk dalam pembuatan peraturan-peraturan. Putra mahkota terpaksa menandatangani *Verklaring* karena desakan pemerintah Hindia Belanda serta kemudahan pemerintah Hindia Belanda dalam mencari pengganti raja jika putra mahkota tidak mau menandatangani *Verklaring* (Soeratman 2000). *Verklaring* yang ditandatangani putra mahkota secara umum merugikan Paku Buwana X karena kekuasaan yang dimiliki raja Kraton Surakarta semakin menyusut.

Penyusutan kekuasaan sebagai konsekuensi penandatanganan *Verklaring* tidak menyurutkan langkah Paku Buwana X menunjukkan kebesaran kekuasaannya. Pembangunan infrastruktur berupa jembatan, gedung-gedung, pasar, bon raja, rumah sakit, tanggul penahan banjir dan gapura yang disertai simbol PB X (Paku Buwana X) merupakan salah satu upaya Paku Buwana X menunjukkan kebesaran kekuasaannya. Pradjapangrawit melukiskan sejak Paku Buwana X naik tahta keadaan Surakarta semakin baik. Kemajuan Surakarta ditunjukkan dengan situasi kota yang kondusif, drainase yang bagus, kemajuan di bidang keagamaan, keamanan terjamin dan karawitan mengalami kemajuan yang pesat (Pradjapangrawit 1990b).

Peneguhan kekuasaan akibat penyusutan kekuasaan sejak penandatanganan *verklaring* lima hari sebelum naik tahta menggantikan Paku Buwana IX secara konsisten dilakukan oleh Paku Buwana X. Salah satu upaya peneguhan kekuasaan yang dilakukan adalah penguatan identitas sebagai bagian dari artikulasi politik Paku Buwana X. Identitas yang digunakan oleh Paku Buwana X sebagai artikulasi politik adalah *Gêndhing Pakurmatan Miyos Dalêm Ladrang Sri Katon laras pelog pathêt barang*.

Identitas dan Artikulasi Politik Kraton Surakarta

Sebagaimana layaknya sebuah negara, Kraton Surakarta atau *Nêgari Surakarta Hadiningrat* memerlukan identitas

sebagai penanda yang berfungsi sebagai pembeda sekaligus pintu masuk bagi individu, kelompok maupun negara lain mengenal Kraton Surakarta. Dengan kata lain identitas dalam konteks sebuah negara merupakan karakter khusus yang melekat dan menjadi pintu masuk bagi individu, kelompok, maupun negara untuk mengenal Kraton Surakarta. Identitas dapat dibentuk melalui tiga jalan yaitu primordialisme, konstruktivisme, dan instrumentalisme. Primordialisme merupakan pembentukan identitas secara alamiah. Salah satu proses primordialisme adalah identitas yang didapat karena keturunan. Konstruktivisme merupakan pembentukan identitas yang dibentuk dari proses sosial yang kompleks. Sedangkan instrumentalisme merupakan pembentukan identitas yang menekankan pada aspek kekuasaan. Pembentukan identitas dengan pendekatan instrumentalisme ini agaknya menjadi pilihan bagi Kraton Surakarta.

Pembentukan identitas sebuah negara pada akhirnya mengarah pada politik identitas. Secara etimologi politik identitas terbentuk dari dua kata yaitu politik dan identitas. Politik berasal dari bahasa Yunani yaitu *politeia*, atau polis yang artinya adalah negara atau kota. Miriam Budiardjo mendefinisikan politik (*politics*) adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau nagara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu (Budiardjo 2002). Sedangkan identitas secara etimologi berasal dari kata *identity* yang artinya sebuah ciri yang melekat pada seseorang atau kelompok misalnya suku, etnis, agama dan yang membedakan dengan yang lainnya. Dua kata tersebut akhirnya membentuk idiom baru yang disebut dengan politik identitas yang bermakna alat politik suatu kelompok seperti etnis, suku, budaya, agama atau yang lainnya untuk tujuan tertentu misalnya sebagai bentuk perlawanan atau sebagai alat untuk menunjukkan jati diri suatu kelompok tersebut (Buchari 2014). Pernyataan tersebut menyiratkan bahwa politik identitas merupakan alat perjuangan yang dipakai suatu kelompok

untuk memperjuangkan apa yang menjadi keinginan kelompok tersebut.

Bagi Paku Buwana X politik identitas di-*create* untuk memperjuangkan eksistensinya sebagai raja *Négari Surakarta Hadiningrat*. Dengan kata lain identitas suatu kerajaan erat kaitannya dengan legitimasi kekuasaan seorang raja. Identitas yang kuat akan berbanding lurus dengan kuatnya legitimasi seorang raja. Seorang raja tentu menginginkan kedudukannya diakui oleh semua orang, hingga semua upaya ditempuh untuk meyakinkan bahwa raja yang bertahta adalah orang yang paling berhak menduduki singgasana kerajaan. Salah satu identitas yang dapat digunakan sebagai peneguh kekuasaan atau sebagai artikulasi politik raja Surakarta adalah *Gêndhing Pakurmatan Miyos Dalêm*.

Ladrang Sri Katon Laras Pélog Pathêt Barang

Purbadipura menuangkan catatan-catatan peristiwa pada masa pemerintahan Paku Buwana X dalam *Sêrat Sri Karongron*. Salah satu catatan atau hasil dokumentasi Purbadipura dalam Serat Sri Karongron adalah deskripsi kehadiran orang-orang penting di tempat upacara. Orang-orang penting yang hadir pada upacara tertentu mendapat sambutan baik dengan orkestra maupun sajian gending. Tokoh-tokoh yang mendapat sambutan tersebut diantaranya adalah raja Paku Buwana X, Residen atau wakil pemerintah Hindia Belanda, putra mahkota Kraton Surakarta, dan Patih Danureja sebagai wakil dari Kasultanan Yogyakarta.

Gending atau musik yang disajikan untuk penghormatan terhadap orang-orang penting tersebut tentu saja menyesuaikan dengan kedudukan tokoh-tokoh penting tersebut. Dengan demikian gending atau musik yang disajikan dapat dipastikan berbeda-beda untuk masing-masing tokoh. Salah satu gending yang disajikan untuk menghormati kedatangan tokoh penting yaitu raja *Négari Surakarta Hadiningrat* adalah *Ladrang Sri Katon laras pélog pathêt barang*. Masyarakat Kraton Surakarta

menyebut *Ladrang Sri Katon laras pélog pathêt barang* dengan sebutan *Gêndhing Pakurmatan Miyos Dalêm* (gending khusus untuk menghormati kedatangan raja).

Salah satu catatan Purbadipura yang mendeskripsikan sajian *Ladrang Sri Katon laras pélog pathêt barang* untuk menghormati kedatangan Paku Buwana X dapat ditemukan pada tembang-tembang berikut ini:

Kinanthi

*anunggil wanci winuwus | sampeyan dalêm sang aji | miyos
saking prabayasa | tansah ingkang ngampil-ampil | upacara
dalêm nata | tungkat sabêt tamèng rukmi | |*

*pagantenan namane dus | tinarètès sotya wêning | bèri lan
anakanira | tan pae sami pinatik | ing barleyan nawa rêtna |
myang kêcohan mas sinangling | |*

*kang ngampil-ampil puniku | para èstri kalung samir | rawuh
madyaning wiwara | pradangga munya ngurmati | gêndhing
srikaton araras | sindhèning talèdhèk ngrangin | |(Purbadipura
1981)*

(Hampir bersamaan waktunya, Sang Raja keluar dari Prabayasa. Lengkap dengan benda-benda penanda kebesaran raja, yaitu tombak pendek dan perisai (tameng))

(Kotak tempat sirih dan nampan serta *kecohan* berlapis emas intan dan berlian)

(Benda-benda tersebut dibawa para putri. Keluarnya raja dihormati dengan alunan *Ladrang Sri Katon* terdengar syahdu)

Rangkaian bait-bait dalam *Têmbang Macapat Kinanthi* mendeskripsikan ketika Paku Buwana X keluar dari *Bangsas Prabayasa (Prabasuyasa)* dihormati dengan sajian *Ladrang Sri Katon laras pélog pathêt barang*. Sajian *Ladrang Sri Katon*

laras pélog pathêt barang untuk menghormati kedatangan raja juga disertai dengan benda-benda penanda kebesaran raja (*herliom*) seperti tombak pendek, perisai, tempat sirih dan perlengkapannya yang dilukiskan berlapis emas serta dibawa oleh *abdi dalêm* yang disebut dengan *manggung kêtanggung jaka palara-lara (ampil-ampil)*. Paku Buwana X raja *Nêgari Surakarta Hadiningrat* ketika sampai di tempat peristiwa tertentu di lingkungan istana Kraton Surakarta selalu dihormati dengan beragam *herliom* serta sajian *Gêndhing Pakurmatan Miyos Dalêm*. Dengan demikian *Ladrang Sri Katon laras pélog pathêt barang* kedudukannya setara dengan benda-benda penanda kebesaran raja yaitu sebagai bagian dari alat legitimasi penanda kebesaran dan kekuasaan raja.

Ladrang Sri Katon laras pélog pathêt barang semakin terlihat sebagai salah satu penanda kebesaran dan kekuasaan Paku Buwana X sebagai raja *Negari Surakarta Hadiningrat* ketika disajikan bersamaan dengan lagu kebangsaan Negeri Belanda yaitu *Wilhelmus*. Purbadipura mendeskripsikan penyajian *Ladrang Sri Katon* bersamaan dengan lagu kebangsaan Negeri Belanda dalam *Pupuh Sinom* dan *Pupuh Dhandhanggula* seperti kutipan berikut ini:

Sinom

*miyos saking prabayasa | sanggyaning para sumiwi | ingkang
anèng dhatulaya | sadaya sami ngurmati | obah dènira linggih
| mastuti miyat sang prabu | andhodhok ngapurancang | para
prajurit prèsentir | ingkang jaga myang prajurit trunakêmbang ||*

*sêtrik orkès munya urmat | lagu wihèlmis ngrêrangin |
bêbarungan lan pradāngga | Kyai Kadukmanis muni | srikaton
dèn sindhèni | suwara ririh raras rum | Kiyai Manisrêngga
| munya gêndhing gonjang-ganjing | swara unyung yèn
tinilingakèn wijang ||* (Purbadipura 1981).

(Keluar dari Prabayasa dihormati oleh semua yang hadir dengan sikap penghormatan termasuk semua kesatuan

prajurit, diantaranya adalah satuan prajurit Truna Kembang)

(Lagu Wilhelms disajikan oleh orkestra diatonis sebagai penghormatan, bersamaan dengan sajian pemusik Jawa dari gamelan Kaduk Manis yang menyajikan Ladrang Sri Katon. Kyai Manisrengga menyajikan Ladrang Gonjang Ganjing. Mengalun jelas bedanya antara bunyi gamelan dan orkestra)

Dhandhanggula

*manggung kêtanggung badhaya srimpi | nèng parasdya ngampil
upacara | sampun lumèngsèr linggihe | marang paningrat kidul
| ya ta wau kangjèng sang aji | tan dangu dènnya lènggah |
anèng dalèm agung | alon miyos mring pandhapa | lampah
dalèm kinurmatan munya gèndhing | srikaton kapiyarsa | |*

*gǎngsa nganyut-anyut dèn sindhèni | musik muni wihèlms
lagunya | bēbarungan sêtrik orkès | pra sowan awotsantun
| obah urmat dènira linggih | andhodhok ngapurancang |
kangjèng sang aprabu | sawusnya lènggah ing dhampar | para
urmat sampun wangsul sami linggih | suwuk gǎngsa musikan | |
(Purbadipura 1981).*

(*manggung kêtanggung badhaya srimpi* sebagai pembawa benda-benda penanda kebesaran raja sudah duduk sesuai tempatnya yaitu di Bangsal Paningrat sisi selatan. Sang raja segera keluar dari *dalem ageng* menuju pendapa dihormati dengan sajian Ladrang Sri Katon)

(Gamelan mengalun syahdu bersamaan dengan suara pesinden dan musik menyajikan Lagu Wilhelms yang disajikan orkestra diatonis. Semua yang hadir memberikan penghormatan kehadiran raja. Sajian gamelan dan orkestra diatonis berhenti ketika raja sudah duduk di singgasana)

Petikan bait dari dua *pupuh* yaitu *Pupuh Sinom* dan *Pupuh Dhandhanggula* di atas merupakan bukti otentik bahwa *Ladrang*

Sri Katon laras pélog pathêt barang disajikan bersamaan dengan *Wilhelmus* lagu kebangsaan Negeri Belanda.

Fakta dari *Pupuh Sinom* dan *Pupuh Dhandhanggula* menunjukkan kesetaraan antara *Gêndhing Pakurmatan Miyos Dalêm* dan lagu kebangsaan Negeri Belanda. Paku Buwana X tidak berkenan jika *Wilhelmus* disajikan sebelum *Ladrang Sri Katon laras pélog pathêt barang*. Kehendak Paku Buwana X menyajikan *Gêndhing Pakurmatan Miyos Dalêm* bersamaan dengan *Wilhelmus* menunjukkan adanya kesadaran berdaulat atas wilayah dan penduduk *Négari Surakarta Hadiningrat*. *Korte Verklaring* yang harus ditandatangani lima hari sebelum naik tahta dijawab dengan politik simbol oleh Paku Buwana X.

Artikulasi Politik dan *Ladrang Sri Katon Laras Pélog Pathêt Barang*

Keberadaan kesenian-kesenian dan hasil kebudayaan yang bersumber dari istana merupakan salah satu unsur penegak wibawa raja. Dapat dikatakan bahwa konsep estetika seni pertunjukan yang hidup dan berkembang di istana Jawa merupakan manifestasi dari ideologi raja (Bandem 2001). Karawitan merupakan salah satu produk seni pertunjukan istana Jawa termasuk di dalamnya Kraton Surakarta dengan berbagai kaidah yang menyertainya. Karawitan di Kraton Surakarta memiliki peran yang signifikan sebagai salah satu unsur penegak wibawa raja. Melalui karawitan raja dapat menunjukkan legitimasi kekuasaannya kepada masyarakat luas.

Seorang raja tentu menginginkan kedudukannya diakui oleh semua orang. Segala daya upaya ditempuh untuk meyakinkan bahwa raja yang bertahta adalah orang yang paling berhak menduduki tahta kerajaan. Ungkapan-ungkapan dalam kesusastraan Jawa yang melukiskan raja sebagai *ratu gung binathara* (raja yang didewakan), *bèr bandha bèr bandhu* (kaya harta benda maupun kerabat), *mbaudhêndha nyakrawati* (memiliki kekuatan untuk menghukum dan menguasai dunia)

menunjukkan bahwa kedudukan raja berada di atas segalanya. Kedudukan raja yang ditengarai berada di atas segalanya tentu membutuhkan beragam sarana sebagai penyangga kekuasaannya. Dengan kata lain diperlukan bermacam sarana atau alat agar seorang raja kedudukannya diakui oleh rakyat hingga semua orang akan patuh dan tunduk pada semua perintah raja (Kasdi 2003).

Paku Buwana X yang dinobatkan menjadi raja *Négari Surakarta Hadiningrat* pada 30 Maret 1893 tentu saja juga memerlukan sarana atau alat sebagai penegak kekuasaannya. Sarana atau alat yang dapat digunakan upaya untuk memperkuat kedudukan seorang raja selanjutnya disebut dengan alat legitimasi raja. Soemarsaid Moertonon menggunakan istilah kultus kemegahan untuk menyebut alat legitimasi atau sarana memperkuat kedudukan raja. Soemarsaid Moertonon mengklasifikasikan kultus kemegahan menjadi dua, yaitu kultus kemegahan yang bersifat bukan materi atau abstrak dan kultus kemegahan yang berupa materi atau lebih konkrit dan bisa dilihat. Kedua sarana itu bermuara pada tujuan yang sama yaitu penegakan wibawa dan kekuasaan raja (Moertonon 1985).

Salah satu alat legitimasi kekuasaan raja Surakarta adalah harta benda. Harta benda milik raja yang dapat digunakan sebagai alat legitimasi atau sarana kultus kemegahan adalah gamelan beserta abdi dalem niyaga dalam jumlah yang besar. Berbagai perangkat gamelan baik gamelan pakurmatan, gamelan ageng, dan perangkat gamelan lainnya dimiliki oleh raja. Tentu saja gamelan milik raja (*kagungan nDalêm gangsa*) memiliki ciri-ciri fisik yang berlainan dengan gamelan di luar istana. Kualitas logam maupun kayu yang digunakan sebagai bahan baku adalah bahan-bahan pilihan. Selain perangkat gamelan, raja juga memiliki *abdi dalêm niyaga* dalam jumlah yang besar.

Saat Paku Buwana X memerintah tidak kurang dari 200 *abdi dalêm niyaga* bekerja di Kraton Surakarta (Supanggah 2002). Jumlah *abdi dalêm niyaga* dan beragamnya perangkat gamelan

sangat berkaitan dengan penyelenggaraan upacara di Kraton Surakarta. Satu upacara sedikitnya tiga perangkat gamelan dibunyikan, sehingga memerlukan banyak *abdi dalêm niyaga* berikut perangkat gamelan yang dibunyikan. Jumlah *abdi dalêm niyaga* yang besar serta banyaknya perangkat gamelan dapat digunakan sebagai petunjuk melimpahnya harta kekayaan raja. Dengan kata lain, *abdi dalêm niyaga* dan alat musik gamelan yang menghasilkan sistem musik (karawitan) dapat digunakan sebagai salah satu alat legitimasi kekuasaan raja. Melalui harta benda berupa gamelan yang disajikan oleh *abdi dalêm niyaga* hingga menghasilkan sistem musik yang dikenal dengan karawitan, Paku Buwana X berupaya melanggengkan dan meneguhkan kekuasaan dan kewenangannya.

Penandatanganan *Korte verklaring* pada 25 Maret 1893 atau lima hari sebelum BRMG. Malikul Kusna naik tahta sebagai Paku Buwana X menyebabkan Sunan tidak lagi kuasa untuk menolak protokoler (tata aturan upacara) yang dibuat pemerintah Hindia Belanda hingga Paku Buwana X membiarkan *Wilhelmus* atau *Wien Nederlands Bloed* tersaji di lingkungan istana. Protokoler yang dibuat pemerintah Hindia Belanda dilawan dengan salah satu artikulasi politik Paku Buwana X yaitu menyajikan *Ladrang Sri Katon laras pélog pathêt barang* bersamaan dengan *Wilhelmus*. Sajian bersama antara gamelan yang membunyikan *Ladrang Sri Katon laras pélog pathêt barang* dan orkestra yang menyajikan *Wilhelmus* akhirnya menghasilkan suara yang dituliskan oleh Purbadipura dengan kata *umyung*.

Sajian karawitan yang dinarasikan dengan kata *umyung*, dalam konteks ini tidak dipandang dari sisi musikalitasnya, melainkan aspek simbolisnya. *Ladrang Sri Katon laras pélog pathêt barang* yang disajikan bersamaan dengan lagu *Wilhelmus* bertangga nada diatonis merupakan manifestasi perlawanan terhadap penjajah, dalam hal ini adalah pemerintah Hindia Belanda. *Ladrang Sri Katon laras pélog pathêt barang* dimaknai sebagai simbol pengagungan penguasa kraton. Sedangkan *Wilhelmus* adalah simbol kekuasaan pemerintah Hindia

Belanda. Kedua simbol pengagungan kekuasaan tersebut disajikan bersama namun masing-masing mempertahankan identitasnya. Bunyi *umyung* yang dihasilkan tidak lagi dianggap penting, namun perlawanan melalui simbol keagungan raja berupa gending menjadi tujuan utamanya. Dengan demikian dalam peristiwa ini, *Ladrang Srikaton laras pélog pathêt barang* dipertaruhkan sebagai penjaga wibawa dan legitimasi kekuasaan raja serta *Négari Surakarta Hadiningrat*.

Ladrang Srikaton laras pélog pathêt barang merupakan gending yang dibunyikan sebagai penghormatan kehadiran raja Surakarta pada peristiwa tertentu. Dalam penyajiannya *Ladrang Srikaton laras pélog pathêt barang* ditemukan sekelompok instrumen (*ricikan*) yang bertugas memainkan melodi pokok yaitu kelompok *ricikan balungan*, yang termasuk dalam kategori ini adalah *saron barung*, *saron penerus*, *demung*, *slenthem* dan *bonang panembung*. *Ricikan-ricikan* ini memainkan melodi pokok yang selanjutnya dapat diidentikkan dengan sebuah titik. Ketika gending berjalan dalam hitungan tertentu *ricikan* struktural menjalin pola tabuhan sehingga membentuk struktur tertentu. Titik-titik di mana *ricikan* struktural ikut bermain itu selanjutnya dapat disebut sebagai titik penting. Titik-titik penting dalam beberapa garis horizontal itu pada akhirnya bertemu pada tempat yang sama. Semakin besar jumlah garis horizontal yang bertemu pada titik tertentu, semakin penting titik tersebut kedudukannya dalam struktur formal. *Seleh* gong merupakan titik sentral yang dijadikan pusat atau muara seluruh permainan instrumen.

Secara hirarki gong merupakan titik paling penting, yakni bertemunya seluruh bagian titik kenong yang terdapat dalam struktur gending. Kenong merupakan pertemuan kethuk dan kempul. Analisis ini menunjukkan bahwa dalam struktur gending Jawa terdapat dua bentuk siklus, yakni siklus besar dan siklus yang lebih kecil. Siklus yang terjadi dalam struktur gending adalah repetisi bentuk-bentuk siklus besar, serta pertemuan siklus yang lebih kecil dalam bentuk siklus yang lebih besar, atau siklus dalam siklus. Sistem musik gamelan

yang demikian pada akhirnya bermuara pada penguatan konsep-konsep kosmologis serta kedudukan raja. (Becker 1980) Dikatakan menguatkan konsep-konsep kosmologis dan kedudukan raja dikarenakan sistem musik yang demikian dibangun dengan aturan-aturan yang sangat ketat menurut prinsip musikal karawitan Jawa seperti prinsip pathet, struktur, bentuk, dan laras.

Seleh gong yang merupakan titik paling penting dalam sistem musik Jawa dipersonifikasikan sebagai raja karena menduduki hirarki tertinggi, sedangkan titik-titik kecil yang membentuk siklus-siklus kecil dapat dipersonifikasikan sebagai rakyat (*kawula*). Dengan demikian dapat dikatakan dalam sebuah penyajian gending-gending Jawa tercermin pula hubungan antara raja dan rakyat atau *manunggaling kawula gusti*. Dalam hal ini kedekatan antara raja dan rakyat dapat dilihat dari panjang pendeknya komposisi gending. Struktur *ladrang* pada *Gendhing Srikaton* merupakan struktur *gendhing tengahan*⁶. Struktur ini menunjukkan bahwa raja berkeinginan selalu dekat dengan rakyatnya untuk menunjukkan legitimasinya. Meskipun kedekatan antara masing-masing kawula dengan raja memiliki kadar yang berbeda, dan tidak semua rakyat dapat dekat dengan raja, melalui sajian *Ladrang Sri Katon Laras Pelog Pathet Barang* hubungan antara raja dan rakyat tetap terjalin dengan baik.

Perintah Paku Buwana X membunyikan semua perangkat gamelan dalam tatacara Garebeg Besar merupakan bagian dari strategi politik simbol. Politik simbol dijalankan oleh Paku Buwana X untuk mendapatkan kembali kewibawaan kraton yang menurun sejak pemerintahan Paku Buwana VII. Tekanan secara politis dari pemerintah Hindia Belanda tidak bisa dilawan dengan senjata. Hingga strategi politik simbol melalui jalur kebudayaan dijalankan. Sajian beragam perangkat gamelan secara bersamaan ditujukan untuk mencapai

Klasifikasi gending menengah, bukan gending besar dengan durasi lama 7
ataupun gending kecil dengan durasi pendek.

tujuan politik Paku Buwana X yaitu mendapatkan kembali kewibawaan personal dan pengakuan masih berdaulatnya *Nêgari Surakarta Hadiningrat*.

Politik simbol merupakan satu-satunya pilihan bagi Paku Buwana X agar tetap diakui sebagai raja dengan segala kewenangan dan kekuasaannya (Kuntowijoyo 1998). Pengurangan kewenangan dan wilayah kekuasaan Paku Buwana X telah terjadi sejak penandatanganan *korte verklaring* pada awal kekuasaan Paku Buwana X. Berdasarkan perjanjian politik itu wilayah kekuasaan Paku Buwana X hanya menyisakan *nagara* (ibu kota) dan *narawita Dalêm* (ranah raja) (Joebagio 2017).

Kecerdasan Paku Buwana X menjalankan politik simbol berupa simbol-simbol budaya memunculkan image bahwa Paku Buwana X masih memiliki kedudukan dan kewibawaan yang kuat. Salah satu bukti bahwa Paku Buwana X masih memiliki kedudukan dan kewibawaan yang kuat adalah sebutan yang melekat pada Paku Buwana X. Pada masa pemerintahan Paku Buwana X, baik abdi dalêm maupun rakyat kebanyakan, menyebut Paku Buwana X dengan sebutan *Sampéyan Dalêm Ingkang Minulya Saha Wicaksana Ingkang Sinuhun Kanjêng Susuhunan Paku Buwana Ingkang Kaping Sadasa* (Pradjapangrawit 1990a). Pada akhirnya kecerdasan Paku Buwana X dalam mengelola simbol-simbol budaya di tengah himpitan politik pemerintah Belanda mampu memancarkan keagungan, kewibawaan, dan kekuasaannya, serta mempertahankan tradisi kejawaannya (Waridi 2006).

Penutup

Kebesaran dan keagungan *Nêgari Surakarta Hadiningrat* yang telah diwariskan turun temurun sejak Paku Buwana II menetapkan Desa Sala berganti nama menjadi *Surakarta Hadiningrat* perlahan mulai menunjukkan penyusutan dan penurunan wilayah kekuasaan dan kewenangan secara politik. Bandara Raden Mas Gusti Malikul Kusno menjadi pewaris ke sepuluh atau Paku Buwana X harus memikul tanggung

jawab mempertahankan kewenangan dan kekuasaan *Nêgari Surakarta Hadiningrat*. Himpitan dan tekanan dari pemerintah Hindia Belanda kepada leluhur Paku Buwana X pada akhirnya menyerpa Bandara Raden Mas Gusti Malikul Kusno. Lima hari sebelum penobatannya menjadi raja *korte verklaring* ditandatangani sebagai syarat penobatan menjadi raja Surakarta.

Penyusutan wilayah dan kewenangan politik tidak menjadikan Paku Buwana X berdiam diri menerima kenyataan. Strategi politik simbol dijalankan Paku Buwana X karena kesadaran sejarah. Di masa lalu, leluhur Paku Buwana X yaitu Paku Buwana VI melawan pemerintah Hindia Belanda secara frontal yang berakibat diasingkannya Paku Buwana VI ke Ambon. Paku Buwana X dengan kecerdasan emosi yang dimiliki, memainkan simbol-simbol budaya untuk melawan kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. *Gêndhing Pakurmatan Miyos Dalêm* yaitu *Ladrang Sri Katon laras pélog pathêt barang* digunakan sebagai artikulasi politik Paku Buwana X sebagai penanda bahwa raja Surakarta Hadiningrat masih berdaulat meski lagu kebangsaan Negeri Belanda berkumandang di lingkungan istana.

Bibliografi

- Ahimsa-Putra, Heddy Shri. 2000. "Wacana Seni dalam Antropologi Budaya: Tekstual, Kontekstual dan Post-Modernistis." Dalam *Ketika Orang Jawa Nyeni*, ed. Heddy Shri Ahimsa-Putra. Yogyakarta: Galang Press.
- Bandem, I Made. 2001. "Drama Tari Gambuh: Sebuah Cerminan Kehidupan Istana." *Jurnal Kebudayaan Kabanaran* 1. Surakarta: ISI Press.
- Becker, Judith. 1980. *Traditional Music in Modern Java: Gamelan in a Changing Society*. Honolulu: The University Press of Hawaii.
- Buchari, Sri Astuti. 2014. *Kebangkitan Etnis Menuju Politik Identitas*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

- Budiardjo, Miriam. 2002. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fananie, Zainudin. 1994. *Pandangan Dunia KGPAH Hamangkunagoro I dalam Babad Tutur: Sebuah Restrukturasi Budaya*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Joebagio, Hermanu. 2017. *Islam dan Kebangsaan di Keraton Surakarta: Dari Paku Buwana IV Hingga Paku Buwana X*. Sukoharjo: Diomedia dan CHERS.
- Kasdi, Aminuddin. 2003. *Perlawanan Penguasa Madura Atas Hegemoni Jawa*. Yogyakarta: Jendela.
- Kuntowijoyo. 1998. *Politik Simbolis Paku Buwana X 1900–1915: Simbol Personal dan Simbol Publik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- . 2004. *Raja, Priyayi, dan Kawula*. Yogyakarta: Ombak.
- Larson, George D. 1990. *Masa Menjelang Revolusi: Keraton dan Kehidupan Politik di Surakarta 1912–1942*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Moertono, Soemarsaid. 1985. *Negara dan Usaha Bina Negara di Jawa Masa Lampau: Studi Tentang Masa Mataram II, Abad XVI Sampai XIX*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mulyono, Edi. 2012. *Belajar Hermeneutika: Dari Konfigurasi Filosofis Menuju Praksis Islamic Studies*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Pradjapangrawit, R. Ng. 1990a. *Serat Sujarah Utawi Riwayating Gamelan: Wedha Pradangga Jilid I*. Surakarta: STSI Press.
- . 1990b. *Serat Sujarah Utawi Riwayating Gamelan: Wedha Pradangga Jilid II*. Surakarta: STSI Press.
- Purbadipura, R. Ng. 1981. *Sri Karongron I*. Ed. Moelyono Sastronaryatmo. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah.
- Soeratman, Darsiti. 2000. *Kehidupan Dunia Kraton Surakarta 1830–1939*. Yogyakarta: Yayasan untuk Indonesia.
- Supanggah, Rahayu. 2002. *Bothekan Karawitan I*. Jakarta: Masyarakat Seni Pertunjukan Indonesia.

Waridi. 2006. *Karawitan Jawa Masa Pemerintahan PB X: Perspektif Historis dan Teoretis*. Surakarta: ISI Press.

Joko Daryanto, *Universitas Sebelas Maret*, Indonesia. Email: jokodaryanto@staff.uns.ac.id.

Bambang Sunarto, *Institut Seni Indonesia Surakarta*, Indonesia. Email: bsunarto432@gmail.com.

Bimo Kuncoro, *Institut Seni Indonesia Surakarta*, Indonesia. Email: bimokuncoro@isi-ska.ac.id.

Manuskripta

Volume 16 No 1, 2026

<https://doi.org/10.33656/manuskripta.v16i1>

R. Bima Slamet Raharja

Teks-teks Lakon Wayang

Karya Ki Widiprayitna Eks-Koleksi

J. L. Moens: Jembatan Masa Lalu terhadap Kajian

Filologi Pertunjukan

Pande Putu Abdi Jaya Prawira

Sarining Pamutus: Mantra Ruwat Jawa Kuno

dalam Catatan Lontar Bali

Joko Daryanto, Bambang Sunarto, Bimo Kuncoro

Ladrang Sri Katon Laras Pelog Pathet Barang:

Artikulasi Politik Masa Pemerintahan

Paku Buwana X

Indra Sopian, Muhammad Sigit Pramudya,

Asep Achmad Hidayat, Dedi Supriadi, Zulmi Ramdani

Formulasi Fitur Visual

Manuskrip Arab Pegon Sunda

untuk Pengembangan Sistem

Handwritten Text Recognition (HTR)

Berbasis Artificial Intelligence (AI)

Hady Prasetya

Bahasa Orang-Orang Mandala:

Relasi Bahasa antara Lontar Sunda

dengan Bahasa Orang Baduy



Published by:

Masyarakat Pernaskahan Nusantara (MANASSA)

Gedung VIII Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya

Universitas Indonesia,

Depok 16424 Jawa Barat

Telp./faks. 021-7870623

E-mail: jmanuskripta@gmail.com